



# PENERAPAN SISTEM PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN SEUMUR HIDUP

Vionie Noventia Thanggestyo \*

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 17 Desember 2024  
Accepted 8 Februari 2025  
Available online 18 April 2025

### Kata Kunci:

Pendidikan  
Kewarganegaraan;  
Pembelajaran Seumur  
Hidup; Cinta Tanah Air

### Keywords:

Citizenship Education;  
Lifelong Learning;  
Nationalism

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan yang timbul akhir-akhir ini akibat kualitas pemahaman akan esensi pembelajaran kewarganegaraan yang minim dari masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah tidak lagi menerima pendidikan kewarganegaraan secara formal. Saat ini muncul berbagai permasalahan yang mencerminkan pudarnya rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap Negara Indonesia, yang menjadi tujuan diberikannya pendidikan kewarganegaraan. Seperti contohnya, ketidakpatuhan akan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta kurangnya partisipasi dalam kontestasi nasional seperti pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mencetuskan sistem pembelajaran kewarganegaraan sedemikian sehingga menimbulkan rasa cinta tanah air pada tiap warga Indonesia seumur hidupnya. Penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis sebab-sebab munculnya permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan pudarnya rasa cinta tanah air ini diharapkan dapat membantu

menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Data berupa signifikansi, urgensi, dan pendapat mengenai efektivitas penerapan sistem ini diperoleh dari pengajuan angket berupa survey dengan target responden segala kalangan umur yang sedang atau pernah mendapatkan pendidikan kewarganegaraan.

## ABSTRACT

*This research is motivated by the many problems that have arisen recently due to the low quality of understanding of the essence of civic education from the community, especially for those who no longer receive formal civic education. Currently, various problems have emerged that reflect the fading sense of love for the homeland and pride in the Republic of Indonesia, which is the purpose of providing civic education. For example, non-compliance with the laws and regulations in force in Indonesia and the lack of participation in national contests such as general elections. This research aims to create a civic education system in such a way as to create a sense of love for the homeland in every Indonesian citizen throughout their life. The research, which is intended to analyze the causes of the emergence of problems in national and state life related to the fading sense of love for the homeland, is expected to help solve these problems. Data in the form of significance, urgency, and opinions regarding the effectiveness of the implementation of this system were obtained from submitting a questionnaire in the form of a survey targeting respondents of all ages who are or have received civic education.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



\* Corresponding author.

E-mail addresses: [13520092@std.stei.itb.ac.id](mailto:13520092@std.stei.itb.ac.id)

## 1. Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Somantri, 2014). Pengetahuan-pengetahuan inilah yang dipandang penting untuk dimiliki setiap Warga Negara Indonesia dalam praktik kehidupan berdemokrasi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pendidikan wajib yang telah masuk dalam kurikulum pendidikan Indonesia pada setiap jenjang, digolongkan sebagai pengembangan karakter. Menurut Zulfikar & Dewi (2021:106) dalam jurnal bertajuk "Pentingnya Pendidikan untuk Membangun Karakter Bangsa", aspek - aspek yang dipaparkan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan adalah pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai - nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti. Dalam jurnal itu juga, dijelaskan pula fungsi dan peran penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional sendiri, menurut Undang - Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 berbunyi "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 37 Ayat (1), secara eksplisit dipaparkan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yakni "... dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air." Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dipandang penting perannya dalam pembangunan rasa nasionalisme dan cinta tanah air sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dalam segala masa tanpa terbatas wilayah Indonesia. Dengan terbentuknya individu - individu yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, maka tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Menurut tim penyusun buku ajar bersama BKS-PTN Barat dalam Buku Ajar Bersama Pendidikan Kewarganegaraan (2017:4), Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), menumbuhkan partisipasi warga negara (*civic participation*) dan mengembangkan tanggung jawab warganegara untuk bela negara (*civic responsibility*). Hakikat dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri untuk membekali dan memantapkan individu dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasila dengan negara dan sesama warga negara. Sebuah negara tentu tidak lepas dari partisipasi warga negaranya. Seorang warga negara tentu tidak terlepas dari sesamanya, dalam hal ini sesama warga negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kemajuan sebuah negara bergantung dari warga negara yang turut berpartisipasi aktif dalam praktik kehidupan berdemokrasi. Seorang warga negara yang cerdas akan memiliki dan mengemban tanggung jawabnya untuk melakukan upaya - upaya bela negara. Dengan rasa tanggung jawab, kebanggaan dan cinta tanah air, serta nilai - nilai pengembangan karakter yang dicapai melalui pendidikan kewarganegaraan, partisipasi aktif warga negara dapat terbentuk. Warga negara yang berpartisipasi aktif ini diharapkan dapat mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dialami negara sehingga kemajuan negara tersebut akan berkembang.

Keberhasilan bagi suatu negara dapat dilihat dari kualitas pemuda bangsanya, para pemuda mempunyai peran yang besar bagi setiap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Perubahan-perubahan yang dibawakan oleh para generasi penerus ini tentunya juga harus tetap mencerminkan nilai-nilai luhur dari Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, suatu sarana untuk menurunkan nilai-nilai ini kepada para penerus bangsa ini diselenggarakan di seluruh Indonesia, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pada masa kini, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) PKn sebagai Pendidikan Politik;
- 2) PKn sebagai Pendidikan Nilai;
- 3) PKn sebagai Pendidikan Nasionalisme;
- 4) PKn sebagai Pendidikan Hukum;
- 5) PKn sebagai Pendidikan Multikultural; dan
- 6) PKn sebagai Pendidikan Resolusi

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan Politik memiliki fungsi untuk menumbuhkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada para pemuda agar dalam penghidupannya, mereka memiliki kesadaran akan politik Bangsa Indonesia, serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi didalamnya. Selanjutnya, PKn sebagai pendidikan nilai yang berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai, moral dan norma yang mencerminkan kepribadian Bangsa Indonesia kepada para generasi muda. Fungsi ini juga turut menunjang fungsi PKn sebagai pendidikan hukum. Fungsi ini sangat penting, karena dengannya maka kesadaran akan hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara dapat tumbuh di pribadi para pemuda.

Indonesia sebagai bangsa yang memiliki berbagai kebudayaan memiliki kecenderungan untuk terpecah di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan suatu pemahaman dan kepedulian dari masyarakat Indonesia sendiri untuk selalu bekerja sama dalam membangun persatuan Indonesia. Sarana yang dapat digunakan adalah Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki fungsi sebagai pendidikan Multikultural, yang menciptakan masyarakat rukun yang saling menghormati, bekerja sama, dan memiliki tujuan yang sama untuk memajukan kerukunan nasional. Dengan tercapainya fungsi satu ini, maka fungsi PKn sebagai resolusi konflik dapat tercapai pula dalam membangun persatuan Indonesia. Fungsi-fungsi diatas apabila terwujud dengan baik, maka akan membentuk rasa nasionalisme pada generasi muda yang menandakan fungsi PKn sebagai pendidikan Nasionalisme berhasil dijalankan.

Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di dunia, dengan menggunakan nama seperti: *civic education*, *citizenship education*, *democracy education*. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggungjawab dan berkeadaban. Menurut rumusan *Civic International* (1995) bahwa "pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan "*civic culture*" untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan, inilah satu tujuan penting pendidikan "*civic*" maupun *citizenship*" untuk mengatasi political apatism demokrasi (Azyumadi Azra, 2002: 12). Semua negara yang formal menganut demokrasi menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan muatan, demokrasi, *rule of law*, HAM, dan perdamaian, dan selalu mengaitkan dengan kondisi situasional negara dan bangsa masing-masing. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak atau komponen bangsa, pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan dan msyarakat industri (Hamdan Mansoer, 2004). Maftuh dan Sapriya (2005) berpendapat bahwa, pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan oleh negara memiliki sebuah tujuan supaya setiap warga negara menjadi seorang warga negara yang baik (*to be good citizens*). Yang dapat diartikan sebagai seorang warga negara yang mempunyai *civics intelligence* yakni kecerdasan dalam kewarganegaraan secara intelektual, sosial dan emosional serta kecerdasan kewargaan secara spiritual. Yang tentunya mempunyai *civics responsibility*; yakni rasa bangga serta bertanggung jawab dalam bernegara serta mampu ikut serta di dalam kehidupan masyarakat.

Lebih spesifik lagi, adapun tujuan Pendidikan Kewarganegaraan terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 yang membahas tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, menurut Abdul Azis Wahab dan Sapriya (2012:311) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2006, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik yang menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang

berkeadaban; menjadi warganegara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Sedangkan menurut Martini, dkk (2013:3) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu membantu mahasiswa mengembangkan potensinya untuk menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap kewarganegaraan dan nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka penerapan ilmu, profesi dan keahliannya serta berpartisipasi dalam kehidupan yang bermasyarakat dari komuniti setempat, bangsa dan dunia. Selain itu, membantu mahasiswa menjadi warganegara yang cerdas, demokratis berkeadaban, bertanggungjawab, dan menggaling kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.

Pembelajaran materi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006:49) ialah bertujuan guna memberikan kompetensi sebagaimana berikut ini:

- 1) Memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis dan rasional serta kreatif berkenaan mengenai isu tentang Kewarganegaraan;
- 2) Berperanserta secara cerdas serta memiliki tanggung jawab, maupun berperilaku secara sadar didalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 3) Agar dapat berkembang secara positif juga demokratis demi membentuk individu yang berkarakter Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia supaya tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik bersama-sama dengan bangsa-bangsa lainnya;
- 4) Dalam berhubungan dengan bangsa lain dalam berbagai peraturan dunia yang secara langsung memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagaimana yang sudah tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 Ayat (3) dan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat (1) dan (2), perlu adanya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah wajib, dan pendidikan tinggi. Namun, sampai sekarang pendidikan kewarganegaraan masih terbatas sampai jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah mengalami banyak penyesuaian serta perubahan, dimulai dengan sebutan *civics* pada tahun 1959, lalu diganti menjadi Kewargaan Negara pada tahun 1962, setelah itu menjadi Pendidikan Kewargaan Negara pada 1968 dan masih banyak perubahan lagi hingga pada tahun 2013 menjadi PPKn. Suyadi (2013:9) mendefinisikan cinta tanah air sebagai sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air merupakan perasaan yang timbul dari hati warga negara untuk mengabdikan, memelihara, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Istilah ini umumnya lekat dengan sekelompok individu yang tergabung dalam sebuah negara.

Lebih lanjut lagi, dalam kaitannya dengan sebuah negara, adanya rasa cinta tanah air menimbulkan aksi-aksi dan tindakan yang menunjukkan kesetiaan, keloyalatan, dan penghargaan tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan berbagai aspek lainnya dalam suatu negara. Rasa cinta tanah air merupakan suatu karakter yang perlu dikembangkan sejak dini. Dengan adanya rasa cinta tanah air yang tidak menjurus pada fanatisme, akan terbentuk warga negara yang mau berpartisipasi aktif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat suatu negara, menghindari berbagai penyimpangan sosial yang merusak norma. Melalui rasa cinta tanah air, akan timbul kebanggaan karena menjadi bagian dari suatu negara, serta oleh karenanya akan turut berpartisipasi dalam berbagai bidang (Sari, 2023). Dalam bidang budaya, misalnya, seorang warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air akan secara aktif berkontribusi dalam pelestarian budaya suatu negara.

Perwujudan dari rasa cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan banyak cara. Salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya, terkesan sepele tetapi dengan melakukan ini, seseorang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan yang ditinggali yang dalam hal ini adalah Indonesia sendiri. Selanjutnya dengan menciptakan kerukunan dalam masyarakat yang dibangun dengan sikap toleransi dan saling menghargai akan perbedaan yang dimiliki pihak lain, seseorang telah mengamalkan nilai luhur Pancasila yang menunjukkan

wujud cinta tanah air dirinya terhadap Bangsa Indonesia. Cinta tanah air juga dapat direalisasikan dengan turut serta dalam dunia perpolitikan bangsa. Tidak harus menjadi pemegang jabatan, dengan sebatas menggunakan hak pilih pada saat pemilu, seseorang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap masa depan bangsa dengan memilih pihak-pihak yang diyakini dapat memajukan Bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa ini. Penelitian ini terdapat empat rumusan masalah, yakni sebagai berikut: 1) Bagaimana efektivitas pendidikan kewarganegaraan pada peserta didik saat ini? 2) Apa korelasi antara pendidikan kewarganegaraan dengan rasa cinta tanah air? 3) Bagaimana metode pendidikan kewarganegaraan yang dapat dilakukan sebagai alternatif? 4) Apakah pendidikan kewarganegaraan seumur hidup diperlukan?

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lexy J. Moleong (2007) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., dengan cara dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang terjadi.

Dalam metode penelitian kualitatif, hasil analisis tidak tergantung dengan jumlah, melainkan tergantung pada data yang dianalisis dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan meliputi kegiatan pengumpulan data dan analisis data. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif maka akan diupayakan untuk mencari data dan pandangan dari orang yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Dalam proses penelitian atau analisis data, semua data yang diperoleh tidak ada yang salah karena merupakan pengalaman dan pandangan orang terhadap fenomena tersebut. Oleh karena itu semua data yang dikumpulkan akan dianggap benar.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dari hasil kuisisioner daring melalui media Google Form yang disebarluaskan kepada mahasiswa/mahasiswi TPB ITB 2021. Kuisisioner tersebut berisi beberapa pertanyaan mengenai pengalaman responden dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selama ini dan pendapat responden terhadap gagasan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan seumur hidup. Sedangkan data sekunder merupakan data/informasi dari sumber lain yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga sudah siap digunakan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan diperoleh menggunakan metode studi Pustaka melalui pencarian di internet berupa jurnal, publikasi, dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber-sumber ini digunakan untuk menjadi dasar teoretis penelitian ini, seperti yang tercantum pada Bab II Dasar Teori, serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan analisis data primer yang diperoleh.

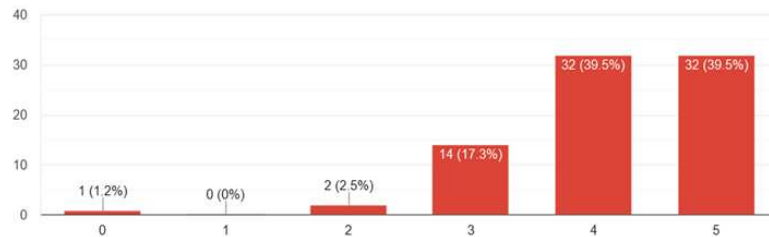
Data yang sudah diperoleh pada tahap pengumpulan data, kemudian diolah menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Data primer yang diperoleh dari kuisisioner berupa persebaran (persentase) jawaban responden untuk setiap pertanyaan akan direkapitulasi kemudian dilakukan analisis untuk mencari keterkaitan/korelasi antardata sehingga pada akhirnya dapat

ditarik kesimpulan. Aspek yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah mengenai perlunya Pendidikan Kewarganegaraan seumur hidup guna menjaga nilai-nilai yang telah dipelajari sebelumnya pada pendidikan formal tidak terkikis oleh waktu.

### 3. Hasil dan pembahasan

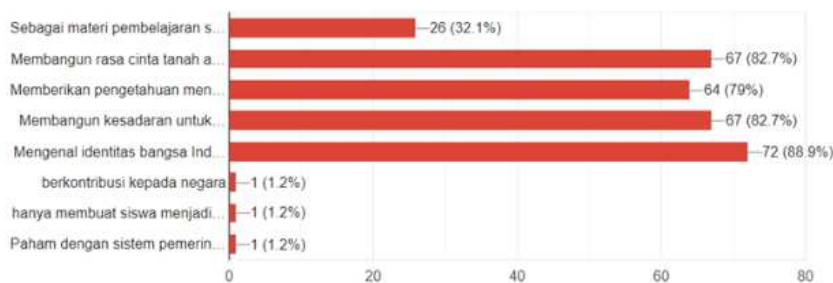
#### Efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan pada Peserta Didik

Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu kewajiban bagi bibit-bibit anak bangsa untuk memahami dan mengamalkan intisari dari pemahaman berkewarganegaraan Indonesia dan telah diakui oleh peserta didik (bertindak sebagai responden) yang dapat dilihat pada gambar berikut.

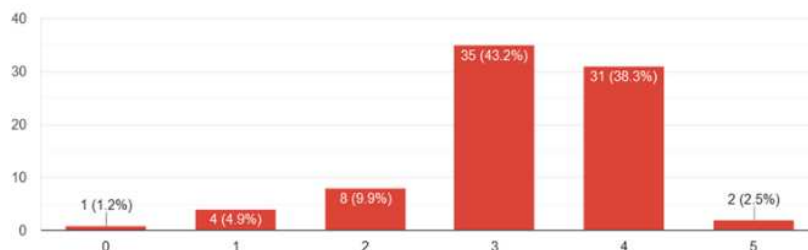


**Gambar 1.** Besar Kepentingan Adanya Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah

Pendidikan kewarganegaraan kepada peserta didik selama sekolah biasanya hanya melingkup pada pemberian materi secara litalatur ataupun melalui praktek *Focus Group Discussion* (FGD) oleh pendidik. Walaupun metode ini merupakan metode “sewajarnya” yang dapat diimplementasikan di seluruh sekolah manapun, metode ini dapat dianggap kurang efektif dalam mengajarkan esensi dari tiap topik di dalam pendidikan kewarganegaraan sesuai tingkatannya.



**Gambar 2.** Respons Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Survei



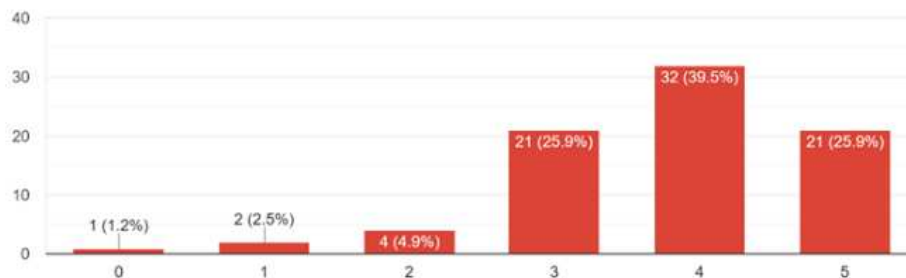
**Gambar 3.** Ketercapaian dari Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan gambar 2 sebanyak 82.7% responden memahami bahwa salah satu tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membangun rasa cinta tanah air. Sebagian besar responden meyakini tujuan pendidikan kewarganegaraan yang mereka maksud telah di atas rata-rata. Namun merujuk pada gambar 3, terdapat sekitar 14.8% responden yang mengakui adapun pengetahuan pendidikan kewarganegaraan dasar yang telah dilaksanakan selama

sekolah sampai dengan saat ini tidak sebegitu terlihat manfaatnya kepada mereka sesuai dengan yang diharapkan dari ketercapaian kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Terdapat pula satu responden dari 81 yang meyakini ia sama sekali tidak mencapai tujuan yang diharapkan setelah mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan analisis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar paham rasa cinta tanah air merupakan salah satu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan, tetapi rasa itu tidak muncul secara utuh meski telah menerima pendidikan kewarganegaraan sebelumnya.

### Metode Pendidikan Kewarganegaraan Alternatif

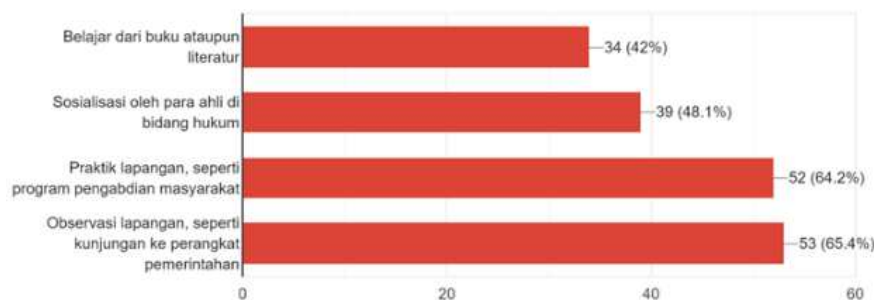
Hasil angket yang kami dapatkan, terlihat sebagian besar responden mengakui pendidikan kewarganegaraan seumur hidup cukup penting, sehingga pendidikan kewarganegaraan seumur hidup diperlukan. Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



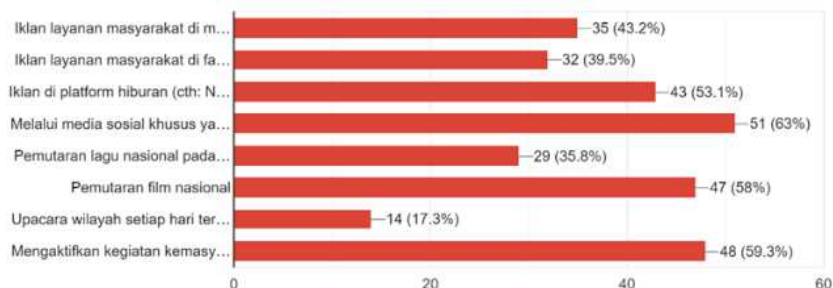
**Gambar 4.** Respons Urgensi Diadakannya Pendidikan Kewarganegaraan Seumur Hidup

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pendidikan wajib yang telah masuk dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan hanya didapatkan selama menempuh pendidikan formal, sehingga orang-orang tidak menjalani pendidikan formal tidak mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Padahal pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan seumur hidup, yang lebih general diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia.

Melalui angket, kami mendapati bahwa sebagai pelajar orang cenderung memilih untuk menerima pendidikan kewarganegaraan dengan metode pembelajaran di luar sekolah. Hal ini seperti, praktik lapangan dan observasi lapangan. Pada metode praktik lapangan, pelajar dapat langsung menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pengabdian. Harapannya dari kegiatan-kegiatan tersebut, pelajar dapat mengembangkan wawasan nusantara. Kemudian pada observasi lapangan, pelajar dapat mengenal pemerintahan Indonesia secara langsung. Hal ini dijadikan landasan agar pelajar dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air. Ada juga dua metode lain yang kurang diminati, yaitu melalui literatur dan sosialisasi oleh ahli. Kedua metode ini, merupakan metode yang bertolak belakang dari dua metode sebelumnya. Metode ini cenderung lebih menitik beratkan pada definisi dan kajian ilmiah dari pendidikan tersebut. Itulah mengapa metode ini kurang diminati.



**Gambar 5.** Respons Metode Pendidikan Kewarganegaraan yang Diinginkan sebagai Pelajar



**Gambar 6.** Respons Metode Pendidikan Kewarganegaraan yang Paling Sesuai Untuk Usia Pasca-Sekolah

Menurut responden, terdapat empat metode yang cukup diminati, yaitu iklan di platform hiburan, melalui media sosial, pemutaran film nasional, dan kegiatan kemasyarakatan. Pada metode pertama, iklan di media hiburan jarang kita temukan. Padahal media hiburan seperti pemutar video merupakan platform yang sering kali digunakan. Selanjutnya pada metode melalui sosial media, hal ini juga sulit untuk ditemukan. Saat negara-negara lain yang mempromosikan negaranya masing-masing, Indonesia pun juga perlu menanamkan kecintaan tanah air melalui media sosial. Kesempatan ini perlu dimanfaatkan karena orang-orang pada zaman ini sering menggunakan sosial media. Pada metode ketiga, pemutaran film nasional, hal ini sering kita jumpai di hari-hari peringatan nasional. Akan tetapi, pemutaran film ini juga dapat lepas dari peringatan hari-hari peringatan sehingga dapat menjangkau lebih banyak orang. Untuk metode yang terakhir, yaitu kegiatan kemasyarakatan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat. Sedangkan untuk metode-metode lainnya yang kurang diminati, metode-metode tersebut sudah biasa diterima masyarakat. Kekurangan variasi ini dapat membuat masyarakat jera dalam menerima informasi tersebut. Melalui kedua hal di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih meminati kegiatan-kegiatan di masyarakat. Dalam hal ini, kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan pengabdian masyarakat.

#### 4. Simpulan dan Saran

Sistem pembelajaran kewarganegaraan sedemikian sehingga menimbulkan rasa cinta tanah air pada tiap warga Indonesia seumur hidupnya. Penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis sebab-sebab munculnya permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan pudarnya rasa cinta tanah air ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Pendidikan kewarganegaraan pada peserta didik saat ini dinilai kurang efektif. Pendidikan kewarganegaraan dengan rasa cinta tanah air yang tumbuh tidak berkorelasi dengan baik. Metode pendidikan kewarganegaraan yang dapat dilakukan sebagai alternatif adalah pendidikan kewarganegaraan melalui kegiatan-kegiatan pengabdian di masyarakat. Pendidikan seumur hidup diperlukan.

#### REKOMENDASI

Tulisan ini masih dapat dikembangkan pada kualitas data angket berdasarkan jumlah respondennya, sehingga data angket yang terkumpul dapat lebih kredibel. Tidak hanya itu, data dapat diambil dari responden pada setiap kalangan umur sehingga dapat dilakukan perbandingan serta analisis terhadap data yang terkumpul dibedakan pada tiap lingkup umurnya. Makalah ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan para ahli kewarganegaraan dalam mengefektifkan penyampaian intisari dari pendidikan kewarganegaraan ke depannya.

#### Daftar Rujukan

- Budiyanto, P. (2004). *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: UNY Press.
- Isep, I. (2016). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum di Kalangan Peserta Didik. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1). <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i1.3474>
- Jamaludin, Ujang, dkk. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan*, Palembang: BKS PTN-Barat.

- Jamaludin, Ujang, dkk., (2017). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Palembang: tim penyusun Buku Ajar Bersama BKS PTN-Barat.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. In PT Remaja Rosdakarya.
- Raharjo, R. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. PKN Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan, 15(1),63-18. <https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44901>
- Sari,N.M.W., Sujana,I.P.W.M., & Sanjaya, D.B. (2023). Validitas Modul Berbasis Flipbook Dalam Menunjang Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila Kelas X. *Ganesha Civic Education Journal*, 5(1), 17-23.
- Suyadi. (2014). Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter. PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1),104-115. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1171>